

Media Cetak	Ujungpandang Ekspres
Tanggal	Selasa 8 Oktober 2024
Wilayah	Kota Makassar



Pjs Wali Kota Intruksikan Percepatan Serapan Anggaran Perubahan

Pjs Wali Kota Instruksikan Percepatan Serapan Anggaran Perubahan

MAKASSAR, UPEKS—Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar guna melakukan percepatan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024.

Instruksi Arwin disampaikan saat memimpin apel pagi di Balai Kota Makassar, Senin (7/10/2024). Ia meminta seluruh OPD mempersiapkan program kegiatan masing-masing secara matang mulai dari perencanaan.

"Jangan sampai terlalu lama pada administrasi sehingga serapan anggaran terganggu yang dikhawatirkan pelayanan publik juga terganggu," tekan Arwin.

Karena itu, ia mengimbau agar seluruh OPD menyajikan

dokumen yang rapi, lengkap dan tertib yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga bertujuan dalam rangka menyambut entry meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurutnya, dokumen administrasi yang rapi, lengkap dan tertib akan memudahkan kerja Inspektorat dan BPK agar tidak terlalu berat. Selain itu, Arwin juga memberikan perhatian dalam tindak lanjut temuan dari BPK sebelumnya.

"Dengan begitu diharapkan Pemkot Makassar tetap mempertahankan Opini WTP," kata Arwin.

Di mana, realisasi serapan anggaran Pemkot Makassar hingga triwulan III 2024 masih di bawah 50 persen. Capaian tersebut, yakni sebesar 47,14 persen atau Rp2,49

triliun dari total APBD-P 2024 sebanyak Rp5,29 triliun.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Makassar, Syibli Muhammad mengatakan, salah satu upaya percepatan serapan anggaran dengan melaksanakan review Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap OPD dengan lebih cepat pula.

Misalkan, review DPA untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024. Review tersebut dilaksanakan sepekan setelah pengesahan APBD-P 2024.

"Review dilakukan 8 September setelah penetapan APBD perubahan di akhir Agustus. Review ini juga dilakukan sebelum pengesahan DPA sebagai upaya kami melakukan percepatan serapan anggaran," katanya. (rul/hms)